



## DPRD KOTA YOGYAKARTA

# SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

PEMKOT DITUNTUT LEBIH PRO AKTIF

### Homestay Berpeluang Bangkitkan Ekonomi Warga

**YOGYA (KR)** - Dibukanya izin pendirian hotel untuk bintang 4 dan 5 serta homestay atau guest house, sebagai dua sisi yang saling bertolak belakang. Hal ini lantaran hotel kelas atas rentan menimbulkan masalah sosial, sedangkan homestay justru berpeluang membangkitkan ekonomi warga.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Dedy Jati Setiawan, menilai peluang homestay dalam menggerakkan ekonomi warga di wilayah jauh lebih besar. "Homestay itu dikelola oleh masyarakat dan berada di tengah permukiman sehingga bisa saling bersinergi," tandasnya.

Jika homestay tersebut memiliki konsumen yang pasti, maka wilayah di sana juga bisa merangkak maju. Apalagi ketika homestay tidak sekadar menjadi tempat menginap, melainkan juga pertemuan. Sehingga potensi yang ada di sekitarnya bisa dikembangkan. Dedy mencontohkan, kebutuhan jamuan untuk pertemuan dapat diakomodir dari warga di sekitarnya.

Namun demikian, Dedy berharap Pemkot lebih pro aktif dalam mendukung pengembangan homestay. Setidaknya akses perizinan bisa dipermudah serta ada kebijakan bantuan hibah bagi kelompok masyarakat di satu tempat yang hendak mengelola homestay. "Harus dipahami, homestay tidak semata mencari profit namun ada pemberdayaan bagi masyarakat se-

**Dedy Jati Setiawan**  
 Komisi B

KR-Istimewa

ngan perhotelan.

Terkait dibukanya izin pendirian hotel bintang 4 dan 5, menurut Dedy, Pemkot harus mengkaji kembali. Pasalnya, okupansi hotel hanya tinggi saat musim liburan. Sementara pada saat-saat ini cenderung sepi sehingga rentan terjadi persaingan harga yang tidak sehat. "Kalau memang ada yang mengajukan izin, harus diantisipasi dampak masalah sosial. Dibukanya moratorium hotel untuk kelas atas kalau alasannya ada tamu yang tidak kebagian kamar sehingga tidur di pom bensin, ini sungguh bukan alasan yang tepat," paparnya.

Salah satu masalah klasik yang kerap terjadi ialah penyediaan air bersih. Satu sisi harus mengandalkan suplay dari PDAM, namun kemampuan BUMD milik Pemkot Yogya ini pun belum siap untuk memenuhi seluruh kebutuhan air bagi perhotelan. Sehingga masih banyak hotel yang mengandalkan air tanah. Kendati aturannya ialah air tanah dalam, namun tidak jarang yang justru memanipulasi sehingga mengambil air tanah dangkal.

"Kalau sampai menyedot air sumur warga sekitar, siapa yang dirugikan. Jelas warga di sekitarnya. Jangan sampai masalah-masalah seperti ini terjadi. Pengawasannya harus benar-benar sesuai," tegas Dedy.

(Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005